



Skripsi:

Kebijakan Australia dalam Penanganan Pencari Suaka Melalui *Operation Sovereign Borders* Era Tony Abbott (Tahun 2013 – 2015)

**Arsha Rahmadhani**

**1610412068**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAKARTA**

**2020**



## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Awal untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Sosial Jurusan hubungan Internasional**

**Kebijakan Australia dalam Penanganan Pencari Suaka Melalui  
*Operation Sovereign Borders* Era Tony Abbott (Tahun 2013 – 2015)**

**ARSHA RAHMADHANI**

**1610412068**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
2020**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Arsha Rahmadhani  
NIM : 161041068  
Program Studi : Hubungan Internasional

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2020



Arsha Rahmadhani

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

**Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Arsha Rahmadhani  
NIM : 1610412068  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Hubungan Internasional

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kebijakan Australia dalam Penanganan Pencari Suaka Melalui *Operation Sovereign Borders* Era Tony Abbott (Tahun 2013 – 2015)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2020



Arsha Rahmadhani

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Arsha Rahmadhani  
NIM : 1610412068  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Kebijakan Australia dalam Penanganan Pencari Suaka  
Melalui *Operation Sovereign Borders* Era Tony Abbott  
(Tahun 2013 – 2015)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta.

**Pembimbing Utama**



**Dr. Asep Kamaludin Nashir, S.Ag. M.Si**

**Pembimbing Pendamping**



**Laode Muhammad Fathun, S.Ip. M.HI**

**Ketua Program Studi**



**Afrimadona, S.IP. MA. Ph.D**

# **Kebijakan Australia dalam Penanganan Pencari Suaka Melalui *Operation***

***Sovereign Borders Era Tony Abbott (Tahun 2013 – 2015)***

**Arsha Rahmadhani**

**1610412068**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari kontradiksi komitmen Australia sebagai negara peratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dengan kebijakan pencari suaka di bawah pemerintahan Tony Abbott, yaitu *Operation Sovereign Borders*. Pada tahun 2013, pemerintahan liberal koalisi Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott mengumumkan akan memberlakukan kebijakan *turn back the boats* sebagai elemen kunci dari kebijakan *Operation Sovereign Borders*. *Operation Sovereign Borders* yang mulai berlaku pada 18 September 2013 sejatinya merupakan operasi militer dengan pendekatan sekuritisasi untuk mencegah dan mengembalikan perahu pencari suaka yang berusaha mengakses suaka di Australia. penelitian ini kemudian berupaya menganalisis upaya sekuritisasi yang dilakukan pemerintahan Abbott, dalam prosesnya, sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Abbott melibatkan media massa guna membentuk opini dan memperoleh dukungan publik. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori sekuritisasi, kedaulatan, dan konsep migrasi ilegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya *framing* dan politisasi fenomena pencari suaka sebagai ancaman bagi kedaulatan Australia sehingga dalam penanganannya diperlukan kebijakan luar biasa yang merupakan legitimasi atas penggunaan militer terhadap pencari suaka.

**Kata Kunci:** Pencari Suaka, Australia, Operation Sovereign Borders, Sekuritisasi, Migrasi Ilegal

## ABSTRACT

This study departs from the contradiction of Australia's commitment as a ratifying country to the 1951 Refugee Status Related Convention with the asylum seeker policy under Tony Abbott's administration, namely Operation Sovereign Borders. In 2013, the liberal coalition government of Australia under the leadership of Prime Minister Tony Abbott announced it would impose a turn back the boats policy as a key element of Operation Sovereign Borders policy. Operation Sovereign Borders, which came into force on 18 September 2013, is actually a military operation with a securalization approach to prevent and restore asylum seekers seeking access to asylum in Australia. This research then attempts to analyze the securitization efforts made by the Abbott government, in the process, the securitization undertaken by the Abbott government involves the mass media to form opinions and gain public support. In analyzing, the author uses qualitative methods with the theory of securitization, sovereignty, and the concept of illegal migration. The results of this study indicate the existence of framing and politicization of the phenomenon of asylum seekers as a threat to Australia's sovereignty, so that in handling this it requires an extraordinary policy which is the legitimacy of the use of the military against asylum seekers.

**Keywords:** Asylum Seekers, Australia, Operation Sovereign Borders, Securitization, Illegal Migration

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat dan karunia Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Kebijakan Australia dalam Penanganan Pencari Suaka Melalui *Operation Sovereign Borders* Era Tony Abbott (Tahun 2013 – 2015)**. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan tepat waktu tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyusun skripsi, terkhusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Kepada Bapak Rachman dan Ibu Yuningsih selaku kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendidik penulis hingga bisa sampai pada hari ini.
3. Kepada keluarga penulis selain kedua orang tua yang telah disebutkan, yaitu Nenek Sari, Tante Naning, Tante Mila, Om Kris, Tante Dewi, dan Tante Nita atas kebaikan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis serta adik penulis, Rully atas kepatuhannya untuk mengantar dan menjemput penulis.
4. Bapak Dr. R. Dudy Heryadi, M.Si selaku Dekan FISIP UPN “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Afrimadona, S.IP. MA. Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan juga Bapak Laode Muhamad Fathun, S.IP.M.H.I. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam membimbing skema penulisan skripsi ini.

7. Jajaran Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman HI UPNVJ angkatan 2016 terkhusus Fatimah Nudhya H sebagai rekan satu tempat Praktik Kerja Lapangan, Tasya Yasinki, Restu Maulidiya, Divya Dine Florence, Michelle Maidangkai, dan Rifatul Amalia M yang berperan sebagai *support system* dengan memberikan dukungan dan keyakinannya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Jakarta Angkatan 2016 terkhusus Prysma Yunisa, teman satu bimbingan selama skripsi.
10. Teman-teman SMP Anisa Yulianti Sajidin dan Dewi Maharani; teman-teman SMK dengan nama geng ACAK yang selalu berperan sebagai penghibur, teman, pendengar dan teman-teman tumbuh bersama sejak masa sekolah.
11. Kepada seluruh jajaran anggota Fisip English of Siloence (EOS) UPN Veteran Jakarta Periode 2016-2017 dan HIMA HI FISIP UPN Veteran Jakarta Periode 2018 atas kesempatannya untuk belajar dan menyerap pengalaman serta ilmu selama penulis menjabat di organisasi ini.
12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang telah membantu banyak dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa/i lainnya dalam penulisan karya ilmiah lain yang relevan.

Jakarta, 28 Juni 2020

Arsha Rahmadhani

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	8
I.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	9
I.3.1 Tujuan Penulisan .....	9
I.3.2 Manfaat Penulisan .....	9
I.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
II.1 Tinjauan Pustaka.....	11
II.2 Kerangka Teori dan Konsep .....	15
II.2.1 Teori Sekuritisasi.....	15
II.2.2 Konsep Kedaulatan ( <i>Sovereignty</i> ) .....	19
II.2.3 Kebijakan Migrasi Ilegal ( <i>Illegal Migration Policy</i> ).....	23
II.3 Alur Pemikiran .....	27
II.4 Asumsi Penelitian .....	28
<b>BAB III.....</b>	<b>29</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
III.1 Jenis Penelitian .....	29

III.2 Sumber Data.....	30
III.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
III.4 Teknik Analisis Data .....	31
III.5 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
III.5.1 Lokasi Penelitian.....	33
III.5.2 Waktu Penelitian .....	33
<b>BAB IV .....</b>	<b>34</b>
<b>DINAMIKA KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP PENCARI SUAKA.....</b>	<b>34</b>
IV.1 Australia dan Perjanjian Internasional mengenai Pengungsi dan Pencari Suaka .....	34
IV.2 Australia sebagai Negara Tujuan Pengungsi dan Pencari Suaka .....	38
IV.3 Perkembangan Kebijakan Australia terhadap Pencari Suaka .....	45
<b>BAB V.....</b>	<b>55</b>
<b>KEBIJAKAN <i>OPERATION SOVEREIGN BORDERS</i> TERHADAP PENCARI SUAKA DI AUSTRALIA ERA TONY ABBOTT SEBAGAI UPAYA SEKURITISASI .....</b>	<b>55</b>
V.1 <i>Premature Labelling</i> Pencari Suaka sebagai Ancaman bagi Pemerintah Australia.....	55
V.2 Kebijakan Pencari Suaka Masa Pemerintahan Tony Abbott .....	62
V.3 Kebijakan <i>Operation Sovereign Borders</i> sebagai Kebijakan Operasional .	67
V.4 Sekuritisasi Permasalahan Pencari Suaka oleh Pemerintahan Tony Abbott .....	74
V.5 Tanggapan Dunia Internasional mengenai Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Australia terkait dengan HAM .....	78
V.6 Legitimasi Australia terkait Kebijakan Pencari Suaka .....	82
<b>BAB VI.....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
V.I Simpulan .....	85
V.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>Riwayat Hidup .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

AHCR	: Australian Human Rights Commission
CRC	: Convention on the Rights of the Child
DIAC	: Department of Immigration and Border Protection
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMA	: Irregular Maritime Arrival
IOM	: International Organization for Migration
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICESR	: International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
MoU	: Memorandum of Understanding
OSB	: Operation Sovereign Borders
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RCA	: Regional Cooperation Agreement
ROC	: Convention on Rights of the Child
SIEV	: Suspected Illegal Entry Vessels
TPV	: Temporary Protection Visa
TV	: Televisi
UNHCR	: United Nations High Commission for Refugee
UNCLOS	: UN Convention on the Law of the Sea
UU	: Undang-Undang

## **DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

Gambar 1: Data Kedatangan *Boat People* Tahun 1976 – 2008 ke Australia

Gambar 2: Data Kedatangan Boat People Tahu 2009 – 2013 ke Australia

Gambar 3. Jumlah Kedatangan Manusia Perahu ke Australia 1976 – 2015

Gambar 4: Papan yang digunakan partai oposisi pada masa kampanye 2013

Gambar 5: Hasil survei yang dilakukan Lowy Institute dalam elektabilitas partai masa kampanye 2013

Gambar 6: Hasil survei yang dilakukan Lowy Institute terhadap kekhawatiran publik terkait kedatangan pencari suaka tahun 2013

Gambar 7. Struktur Kebijakan OSB

Gambar 8: Poster Operation Sovereign Borders yang dirilis resmi oleh pemerintah Australia

Tabel 1: Data Kedatangan Manusia Perahu Tahun 1976 – Agustus 2001

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Cek Turnitin

Skor TOEFL

Sertifikat